

Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua

Lusyana Treza Tampubolon*, dan Wa Ariadi**

*Mahasiswa Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

** Dosen Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 10 Desember 2022

Disetujui 31 Januari 2023

Keywords:

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK

Abstract : *This study aims to determine whether capital expenditures and personnel expenditures partially and simultaneously affect PAD. The results of the study show that if capital expenditure (X1) and personnel expenditure (X2) are equal to 0, then Local Own Revenue (Y) will decrease. , the value of R is 0.928 which means that all independent variables have a relationship even though the relationship is very strong, and this is confirmed by the large value of the Adjusted R Square where 85.5% of the variable capital expenditure (X1) and personnel expenditure (X2) have a very strong influence on Regional Original Income (Y) as evidenced by the results of hypothesis testing. The capital expenditure variable (X1) has a positive and significant effect on Regional Original Income, because the tcount value is greater than the ttable value (2.966 > 2.447) and the sig. greater than alpha (0.041 < 0.05), thus the first hypothesis is accepted. For the test results on the personnel expenditure variable (X2) shows that it has no significant negative effect on the Regional Original Income of Papua Province, because the tcount is smaller than the ttable value 4.795>2.447) and the sig. greater than alpha (0.009 < 0.05)*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah belanja modal dan belanja pegawai secara parsial dan simultan berpengaruh pada PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika belanja modal (X₁) dan belanja pegawai (X₂) nilainya sama dengan 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami penurunan. , besarnya nilai R adalah 0,928 yang bermakna bahwa semua variabel bebas mempunyai hubungan meskipun hubungan tersebut adalah sangat kuat, dan hal ini di pertegas dengan besarnya nilai dari *Adjusted R Squarenya* 85,5% variabel belanja modal (X1) dan Belanja Pegawai (X2) mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada Pendapatan Asli Daerah (Y) yang dibuktikan dengan hasil uji hipotesis. Variabel belanja modal (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena nilai *t_{hitung}* lebih besar dari nilai *t_{tabel}* (2,966 > 2,447) dan nilai sig. lebih besar dari alfa (0,041 < 0,05), dengan demikian maka hipotesis pertama diterima. Untuk hasil uji pada variabel belanja pegawai (X₂) menunjukkan bahwa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua, karena nilai *t_{hitung}* lebih kecil dari nilai *t_{tabel}* 4,795>2,447) dan nilai sig. lebih besar dari alfa (0,009 < 0,05).

Open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Alamat Korespondensi :

Wa Ariadi,

Magister Manajemen,

STIE Port Numbay Jayapura

Jalan Beringin Entrop - Kota Jayapura

E-Mail : waariadi@gmail.com

PENDAHULUAN

Provinsi Papua dengan jumlah kabupaten sebanyak 28 kabupaten dan 1 kota merupakan provinsi terbesar dan terluas dengan akses jangkauan antara kabupaten masih sangat terbatas, sehingga distribusi pembangunan pun masih belum merata di segala bidang. Prioritas program pembangunan daerah Papua jangka menengah 2019-2023 sebagaimana yang telah disusun sesuai tujuan strategis, urusan, kewenangan, kebijakan belanja (belanja langsung/belanja tidak langsung), serta yang menjadi utama di setiap wilayah adat. Besaran anggaran belanja daerah tersebut tentu diharapkan dapat digunakan sedemikian rupa untuk pelayanan publik dalam mewujudkan pembangunan dari hulu hingga hilir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan gabungan indikator kinerja *outcome* dari beberapa unit kerja Provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditunjukkan dengan indikator kinerja ekonomi, tingkat pendidikan dan kesehatan.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang di peruntukan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasana. Menurut Wa Ariadi, (39;2021) belanja modal adalah belanja untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Total belanja modal Pemerintah Provinsi Papua selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2015-2021) mencapai Rp 17.258.099.697.228 dengan tingkat Rata-rata belanja setiap tahunnya mencapai Rp 2.465.442.813.890. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangun yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004:73).

Kajian terkait belanja modal sudah cukup banyak dilakukan namun hasil kajiannya menunjukkan adanya kesamaan maupun perbedaan diantara para peneliti. Vera Felicia (2020) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa belanja modal, belanja pegawai, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Darwanis dan Ryanda Saputra (2014) menyampaikan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Selain belanja modal, belanja pegawai juga merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang menarik untuk selalu dikaji. Kondisi disebabkan karena jumlah belanja pegawai dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jumlahnya tidak jauh beda dengan besaran belanja modal yang peruntukannya untuk kepentingan Masyarakat. Jumlah belanja pegawai pada pemerintah Provinsi Papua tahun 2015-2021 adalah Rp. 14.491.902.310.573 dengan tingkat Rata-rata setiap tahunnya adalah Rp.2.070.271.758.653. Burhanudin (2012) besarnya jumlah dana pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar pula, hal ini tak sebanding dengan pendapatan asli daerah yang masih kurang memadai dalam menutup pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran belanja diindikasikan menyerap dana transfer dari pemerintah pusat yang lebih, maka belanja pegawai di perkirakan menjadi salah satu penyebab terjadinya *fly-paper effect* pada pemerintah daerah. Belanja Pegawai adalah belanja seluruh pengeluaran Pemerintah Negara maupun Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pensiunan, TNI/Polri dan pejabat Negara sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan, Ariadi, W., dan Surjandari, R. (2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Agus Semekto (2011) anggaran adalah sarana yang digunakan mewujudkan pencapaian peningkatan produktivitas, pertumbuhan, pengembangan ekonomi serta peningkatan produktivitas pendapatan perkapita dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Anggaran dapat pula digunakan sebagai alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja srta ukuran standar untuk evaluasi kinerja. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan dua aspek, yakni aspek pendapatan dan pengeluaran, namun demikian manajemen belanja daerah harus mendapat perhatian yang lebih dominan dibandingkan dengan manajemen pendapatan, sebab pengeluaran uang jauh lebih mudah dibanding dengan mendapatkan uang.

Menurut Mahmudi (2010;78) menyatakan bahwa belanja daerah mempunyai dua aspek yang secara konseptual berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat yakni kebijakan belanja (*expenditur policy*) berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran atau belanja yang cenderung bersifat politis dan manajemen belanja (*expenditure management*) dimana bersifat teknis sehingga dalam pelaksanaan anggaran untuk

membayai aktivitas harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan dan berperan sebagai proses penganggaran sangatlah signifikan, karena penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja tentunya akan semakin berpengaruh dalam penetapan tujuan dan *outcome* hingga akhirnya dapat diejawantakan dalam angka-angka pada pos belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Annisa, 2010).

Menurut Peraturan Menteri keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran menyampaikan bahwa Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk: 1). Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI, 2). Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara; 3). Belanja Uang Makan PNS dan Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI; 4). Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara yang disalurkan melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI; 5). Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES; 6). Belanja Uang Lembur PNS; 7). Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah; 8). Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan belanja lainnya yang bersumber dari Kas daerah maupun Negara. Setiap daerah Anggaran Belanja pegawai tentunya tidak sama, tergantung jumlah pegawai, dan tingkat kemahalan dari setiap daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kuantitatif bersifat kausal komparatif yakni dengan membandingkan atau ingin mengukur hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, Sugiono (2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berasal dari data Laporan Realisasi Anggaran Daerah Provinsi Papua yang diperoleh secara langsung melalui laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2015-2021. Proses olah data dilakukan melalui Aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

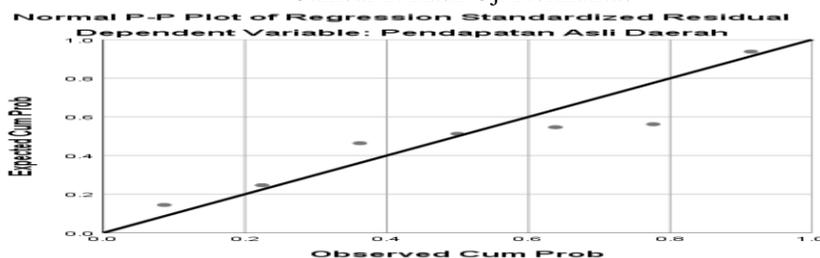
1) Uji Asumsi Klasik

Sebelum disampaikan hasil analisis Regresi berganda dari pengaruh Belanja Modal (X1), Belanja Pegawai (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) maka perlu disampaikan bahwa model Regresi berganda ini merupakan model analisis yang tepat jika model tersebut memenuhi asumsi klasik statistik, baik itu normalitas, multikolinearitas dan heteroskedasitas (Bhuono, 2005). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik ini menggunakan program aplikasi SPSS versi 21 dengan hasil analisis yang dapat dilihat pada uraian berikut ini:

2) Uji Normalitas Data

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan gambar tersebut maka, terlihat bahwa Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Data dinyatakan berdistribusi normal karena sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai tersebut normal.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas yang dapat dilihat melalui nilai *inflation factor* (VIF) pada model regresi yang dihasilkan. Berikut ini hasil uji multikolinearitas yakni sebagai berikut:

Tabel.1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Belanja Modal	0,362	2,760
Belanja pegawai	0,362	2,760

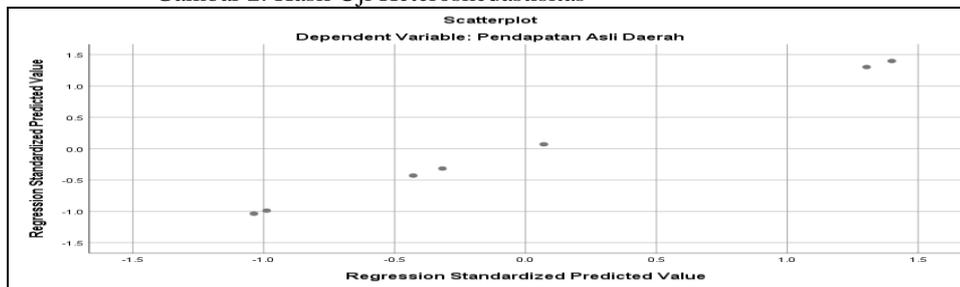
Sumber: Output SPSS, 2022

Dari uraian tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai *tolerance* untuk variabel belanja modal (X_1) dan belanja pegawai (X_2) menunjukkan hasil 0,362 atau lebih besar dari 0,10, demikian dengan hasil dari VIFnya yakni $2,760 <$ dari 10,00 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4) Uji Heteroskedastisitas

Salah satu model dari regresi adalah model yang memenuhi syarat bahwa ada kesamaan pada varian antara residu satu dengan pengamatan dan lainnya yang disebut pula dengan *homoscedasticity*. Adapun hasil analisis dari uji heteroskedastisitas adalah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS, 2022

Dari gambar tersebut maka, terlihat bahwa titik-titik menyebar diantara sumbu X dan Y dan sebaran tersebut berada di atas dan di bawah titik nol sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil tersebut didukung teori yang disampaikan oleh (Ghozali, 2011).

5) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan nilai *durbin watson* (DW). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria Durbin Watson tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu: Nilai D-W di bawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif, Nilai D-W di antara -2 sampai +2 artinya tidak ada utokorelasi, Nilai D-W di atas +2 artinya terdapat autokorelasi negatif.

Berdasarkan kriteria tersebut maka hasil uji autokorelasi adalah nilai Durbin-Watson 2,505 sehingga nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2 artinya bahwa model regresi yang digunakan untuk menganalisis korelasi tidak ada kesalahan pengganggu antara periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi diantara data yang digunakan.

6) Hasil Analisis Regresi

Hasil analisis pengaruh Belanja Modal (X_1), Belanja Pegawai (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Papua menunjukkan sebagaimana uraian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-14,229	9,041	
	Belanja Modal	0,634	0,188	0,873
	Belanja Pegawai	0,853	0,148	1,489

Dependent Variable: PAD

Sumber : Output SPSS, 2022

Dari tabel hasil analisis di atas maka akan disusun persamaan regresi linier berganda sebagaimana variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = -14,229 + 0,634X_1 + 0,853X_2.$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa Nilai konstanta (a) sebesar -14,229, yang bermakna bahwa jika belanja modal (X_1) dan belanja pegawai (X_2) nilainya sama dengan 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan mengalami penurunan sebesar 14,229%. Sedangkan koefisien regresi variabel belanja modal (b_1) adalah 0,634 yang berarti bahwa setiap kenaikan belanja modal sebesar Rp 1 maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 0,634 jika nilai dari variabel lainnya dianggap tetap (konstan). Koefisien regresi variabel belanja pegawai (b_2) adalah 0,853. Hasil ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada belanja pegawai sebesar 1 persen dari anggaran, dan variabel lainnya dianggap tetap (konstan), maka Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) Provinsi Papua akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,853.

7) Hasil pengujian hipotesis untuk parsial (Uji-t)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat dan membuktikan hipotesis penelitian untuk uji parsial yakni hipotesis pertama dan kedua dengan tujuan untuk membuktikan apakah variabel X_1 dan X_2 secara parsial mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y) atau tidak. Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Uji-t

Model	t	Sig.
1		
(Constant)	2,962	0,041
Belanja Modal	5,844	0,004
Belanja Pegawai	-5,961	0,004

Sumber Data: Diolah, 2022

Dari tabel diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel belanja modal X_1 adalah sebesar = 5,844 dengan sig. = 0,004 sedangkan nilai t_{hitung} variabel X_2 (belanja pegawai) adalah sebesar = -5,961 dengan sig. = 0,004. Untuk besarnya Nilai t_{tabel} dengan jumlah sampel sebanyak 7 dimana df totalnya = 6 adalah sebesar 2.447. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Variabel belanja modal (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($5,844 > 2,447$) dan nilai tingkat signifikannya lebih kecil dari alfa ($0,004 < 0,05$), dengan demikian maka hipotesis pertama diterima.

Variabel belanja pegawai (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($-5,961 > 2,447$) dan nilai sig. lebih kecil dari alfa ($0,004 < 0,05$), dengan demikian maka hipotesis kedua juga diterima.

8) Hasil pengujian hipotesis untuk Uji Simultan (Uji-F)

Uji Simultan digunakan untuk menguji guna membuktikan pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Yang dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS for Windows versi 21 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	0,514	2	0,257	18,647	0,009 ^b
Residual	0,055	4	0,014		
Total	0,569	6			
a. Dependent Variable: PAD					
b. Predictors: (Constant), Belanja Pegawai, Belanja Modal					

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 18,647 dengan F_{sign} sebesar 0,009. Nilai F_{tabel} dengan jumlah sampel 7 dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 4$ (total $df = 6$) adalah 5,14. Dari hasil uji simultan tersebut, menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($18,647 > 5,14$). Sedangkan jika dilihat berdasarkan nilai p-value maka, $F_{sig} < 0,05$ yakni $0,009 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Belanja Modal (X_1) dan Belanja Pegawai (X_2) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Papua. Dengan demikian maka hipotesis ke tiga (H_3) dari penelitian ini yang disampaikan pada bab sebelumnya yakni diduga belanja modal dan belanja pegawai secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel-variabel independen.

9) Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi adalah salah satu metode dalam teknik analisis korelasi yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kekuatan hubungan antar dua variabel. Dimana hasilnya dapat memperlihatkan kekuatan hubungan, signifikansi hubungan, dan arah hubungan. Sedangkan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

Persamaan serta uraian tersebut akan diperjelas dengan hasil analisis koefisien korelasi untuk menyampaikan hubungan dari masing-masing variabel. Adapun hasil analisis korelasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,950 ^a	0,903	0,855	0,11736

a. Predictors: (Constant), Belanja Pegawai, Belanja Modal

b. Dependent Variable: PAD

Hasil analisis pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan diantara semua variabel penelitian yang digunakan yakni variabel belanja modal (X_1) dan Belanja Pegawai (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y), dimana nilai koefisien korelasi (R) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,950. yang bermakna bahwa secara keseluruhan variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Variabel terikat. Hal ini dipertegas dengan besarnya nilai dari koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yaitu sebesar 0,855 atau 85,5% yang bermakna bahwa variabel Belanja Modal (X_1) dan Belanja Pegawai (X_2) memberikan kontribusi pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel (Y) sebesar 85,5% dan sisanya sebesar 14,57 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji parsial, diketahui bahwa belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Papua. Pernyataan ditetapkan berdasarkan hasil uji-t dimana nilai tingkat signifikan variabel belanja modal lebih kecil dari taraf nyata yang ditetapkan. Penjelasan ini bermakna bahwa semua variabel bebas mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap Variabel terikat. Hal ini dipertegas dengan besarnya nilai dari koefisien korelasi dan determinasi (*Adjusted R Square*) yang menjelaskan bahwa dimana 85,5% belanja modal dan belanja pegawai memberi kontribusi pengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Papua, karena belanja modal yang ada di Provinsi Papua menggunakan belanja modal tersebut untuk menambah aset tetap daerahnya yang dapat berupa pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk pelayanan publik, maka pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal pada anggaran pendapatan belanja daerahnya, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pelayanan publik yang baik, akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Belanja modal diharapkan akan menambah daya tarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, menambah pendapatan asli daerah yang akhirnya akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah tercapai.

Sedangkan Belanja pegawai berperan dalam kinerja perangkat daerah, dengan memberikan kompensasi sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan mendorong produktifitas kerja para perangkat daerah (Darwis, 2015). Namun, tidak baik apabila porsinya terlalu besar karena belanja pegawai tidak memiliki hubungan langsung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, apabila belanja pegawai terus meningkat akan menghambat pertumbuhan pendapatan asli daerah. Artinya bahwa, belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua dapat dialokasi sebaik mungkin sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Papua, hal ini dapat dilihat seperti pada data realisasi belanja pegawai dan realisasi pendapatan asli daerah periode 2020 dan 2021, dimana

ketika realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sekitar 53%, maka realisasi pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan sekitar 67%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat di simpulkan bahwa secara parsial Variabel belanja modal (X_1) dan belanja pegawai (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Demikian juga hasil uji simultan menjelaskan bahwa bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Papua. Hasil analisis koefisien korelasi menjelaskan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dan variabel terikat mempunyai hubungan yang sangat kuat, yang dipertegas dengan nilai dari koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yaitu yang bermakna bahwa variabel Belanja Modal (X_1) dan Belanja Pegawai (X_2) memberikan kontribusi pengaruh yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SARAN

Adapun yang disarankan dari hasil penelitian ini bahwa Pemerintah Provinsi Papua harus lebih mengoptimalkan anggaran belanja modal agar dapat mendorong upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi, Pengelolaan sumber Kekayaan daerah di Kabupaten dan Kota serta perbaikan kualitas dan kinerja pegawai yang didorong dengan pemberian tambahan penghasilan. Perlu ada upaya lain yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang lebih prospektif untuk menjadi sumber penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran
- Agus Samekto (2011) Dampak desentralisasi Anggaran terhadap Kinerja pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur).
- Ariadi, W., dan Surjandari, R. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Provinsi Papua. *Jurnal JENDELA*, 8 (1)
- Annisa, Trianingsuh (2010), Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Otonomi daerah Tahun 2008-2009". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Burhanuddin, Ahmad. (2012). Pengaruh Belanja Pegawai, Pinjaman Daerah dan Investasi Pemerintah terhadap Fenomena Flypaper Effect. *Accounting Analisis Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Halim, Abdul (2004), Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo (2002), Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th. I No. 4 Juni 2002. Jakarta.
- Ryanda Saputra (2014). Pengaruh Belanja Belanja Modal Terhadap PAD dan Dampaknya pada kinerja keuangan (studi empiris Pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Vera Felicia (2020), Pengaruh Belanja Modal, Belanja Pegawai, Leverage dan pertumbuhan EKonomi Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2014-2018.
- Wa Ariadi, S. E. (2021). Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep Dan Analisis. Penerbit; Deepublish Yogyakarta